

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian ini didasarkan pada jalannya model Sosialisasi Politik Masyarakat, berdasarkan penemuan dan analisis peneliti, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Model Sosialisasi Politik Masyarakat yang dilaksanakan oleh PDIP Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memberikan pendidikan politik dan indoktrinasi politik kepada masyarakat.

Sosialisasi politik masyarakat yang dilaksanakan oleh PDIP Kabupaten Bandung Barat Adalah dengan menggunakan dua metode yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik non-formal. Pendidikan politik formal partai lebih berperan dalam fungsi pengawasan penanaman nilai-nilai pancasila kepada pelajar, dan pelaksanaan pendidikan politik non-formal yang dilaksanakan oleh partai PDIP Kabupaten Bandung Barat adalah melewati pendidikan politik oleh kader partai atau langsung oleh partai politik.

Indoktrinasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten Bandung Barat ialah dengan melalui kader partai atau langsung dilaksanakan oleh partai PDIP Kabupaten Bandung Barat secara langsung. Pelaksanaan indoktrinasi politik oleh kader partai ialah dengan ialah dengan melalui perkumpulan yang ada di sekitar tempat tinggal kader untuk mendapatkan suara serta dapat memberikan indoktrinasi kepada masyarakat agar berlabuh kepada PDIP Kabupaten Bandung

Barat. Lalu yang dilakukan oleh partai ialah dengan melaksanakan kampanye blusukan yang dinilai berhasil saat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Lalu dengan menjaring generasi milenial dengan merekrutnya untuk ikut menjadi anggota organisasi sayap partai PDIP Kabupaten Bandung Barat.

1. Faktor Pendukung Model Sosialisasi Politik

1. Sumber daya pendukung atau simpatisan partai yang melimpah di DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat. Simpatisan atau pendukung partai di DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat tergolong banyak karena DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat adalah partai yang besar dan selalu menjadi partai dengan perolehan tertinggi di setiap pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat yang menjadikan masyarakat yang tergabung dalam simpatisan partai dapat terpapar oleh pendidikan politik partai melalui doktrin yang dilaksanakan partai.
2. Organisasi partai yang terstruktur dari pusat sampai ketinggian RT/RW. Organisasi PDIP yang sampai mencangkup ke tingkat RT/RW yang biasa disebut sebagai PAC (Pengurus Anak Cabang) yang dimiliki oleh DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat menjadikan anggota masyarakat yang terjaring untuk bergabung di partai menjadi luas jangkauannya dan memudahkan partai dalam memberikan doktrin partai kepada masyarakat sesuai dengan ideologi partai.
3. Memiliki organisasi sayap partai yang cukup banyak. Kepemilikan organisasi sayap partai yang dimiliki partai PDIP menjadikan

kemudahan kepada partai dalam memobilisasi masa untuk diberikan pendidikan dan indoktrinasi politik terutama kepada generasi muda karena anggota dari organisasi partai rata-rata adalah generasi muda.

4. Anggaran pelaksanaan pendidikan politik. Pendidikan politik masyarakat memiliki anggaran dana dari pemerintah seperti yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

2. Faktor Penghambat Model Sosialisasi Politik

1. Sosialisasi politik masih belum merata ke lingkungan masyarakat yang berada di kampung atau daerah terpencil karena luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
2. Sosialisasi politik hanya diberikan kepada masyarakat calon kader partai. Pendidikan politik yang dilaksanakan DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat hanya kepada masyarakat calon kader saja karena tidak semua masyarakat akan mau atau antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat.

Upaya DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan sosialisasi politik yang optimal dan maksimal adalah dengan memperkuat fondasi dasar struktur partai di PAC, anak ranting, dan ranting. Serta komposisi yang memadukan antara kader senior dan muda menjadikan regenerasi partai akan lancar.

Upaya dari model sosialisasi politik yang dilaksanakan DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat adalah dengan cara memberikan pendidikan politik non-formal, mengawasi pendidikan politik formal yang ada di lingkungan pendidikan, indoktrinasi politik dilaksanakan oleh kader partai dan partai politik. Pendidikan politik masyarakat non-formal dilakukan dengan cara pembicaraan empat mata atau hanya kepada simpatisan mereka. Doktrin yang dilaksanakan oleh partai dilakukan dengan kampanye blusukan serta berkampanye melalui media sosial. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi politik ialah dengan memperkuat struktur partai ditingkat PAC, anak ranting, ranting dan meracik komposisi kader senior dan muda dalam persiapan regenerasi ditubuh partai PDIP Kabupaten Bandung Barat.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa dalam menjalankan Sosialisasi Politik Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, variable model sosialisasi politik masyarakat disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel koordinasi sebagai pendekatan.

5.2.2. Saran Praktis

- a. Disarankan sosialisasi politik masyarakat untuk dilakukannya pengawasan terhadap pendidikan politik secara formal yang dilaksanakan didalam lingkungan

sekolah atau seminar yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan pendidikan politik.

b. Sanggup dan mau mengambil resiko untuk bereksperimen mengadakan perkumpulan masyarakat untuk diberikan pendidikan politik.

c. Pelaksanaansosialisasi politik harus dimodelkan secara matang dengan dilaksanakannya *planning, organizing, actuating, dan controlling* dan di akhiri dengan evaluasi agar kekurangannya serta kelebihanannya akan nampak untuk diperbaiki atau ditambahkan dikemudian hari.

d. Harus memiliki inovasi dalam menarik minat masyarakat untuk mengetahui kegiatan sosialisasi politik dengan dikonsepsikan seperti *family gathering* namun tetap fokus kepada pelaksanaan sosialisasi politik itu sendiri.

e. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendataan yang dibutuhkan untuk mengetahui wilayah dimana masyarakat masih belum mendapatkan sosialisasi politik.